

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian perencanaan dan penganggaran bidang tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih dan bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal, penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial yang dilihat melalui dokumen RKPD, PPAS dan APBD Kabupaten Solok pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun 2014, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebelum tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
2. Dari tingkat konsistensi program dan kegiatan, konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Konsistensi yang lebih rendah ada antara RKPD dan PPAS. Penyebab ketidakkonsistenan antara RKPD dan PPAS maupun antara PPAS dan APBD adalah :
 - a. Dalam penyusunan PPAS tidak begitu mempedomani RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak sepenuhnya memeriksa kembali antara program dan kegiatan yang terdapat pada RKPD dan PPAS.

- b. Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dalam bidang perencanaan dan penganggaran.
 - c. Kemampuan keuangan yang rendah, mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat diakomodir.
 - d. Adanya beberapa kegiatan pada salah satu dokumen dijadikan satu kegiatan pada dokumen lainnya, begitupun sebaliknya satu kegiatan pada suatu dokumen menjadi beberapa kegiatan pada lainnya.
 - e. Tidak adanya pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran yang ketat sehingga program dan kegiatan dapat masuk pada dokumen PPAS ataupun APBD, namun belum ada pada dokumen sebelumnya.
 - f. Adanya kebijakan dari pusat/propinsi yang hadir dalam rentang waktu penyusunan anggaran yang wajib dianggarkan dalam APBD.
3. Tingkat konsistensi indikator kinerja, target kinerja dan alokasi anggaran sangat rendah, hal ini disebabkan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan anggaran lebih fokus pada program dan kegiatan saja dan sepertinya indikator kinerja, target kinerja dan pagu dana diabaikan saja.

1.2 SARAN

Dari hasil penelitian untuk memperkecil ketidakkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran saran yang dapat diberikan adalah :

1. Peningkatan komitmen para pengambil keputusan untuk mempedomani dokumen perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.

2. Peningkatan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
4. Peningkatan kualitas SDM perencana agar dapat melaksanakan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku serta menambah jumlah tenaga fungsional perencana.
5. Pelaksanaan kebijakan dalam melakukan mutasi dan penempatan pegawai sebaiknya memperhatikan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti pegawai yang bersangkutan.
6. Pengembangan dan penerapan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran.

